

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

TAHUN 2022

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 	Kepala Divisi Adimistrasi	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas. 2. Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna. 3. Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Masyarakatan. 2. Persentase Warga Binaan Masyarakatan yang terampil dan bersertifikat. 3. Menurunnya Persentase Residivis. 4. Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan. 	Kepala Divisi Masyarakatan	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Hukum.</p> <p>4. Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak.</p>			
Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Riau.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Riau. 2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Riau. 3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Riau. 	Kepala Divisi Keimigrasian	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
Program Administrasi Hukum Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah. 2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD. 3. Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah. 2. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah. 3. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum. 	Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM. 2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah. 2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah. 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah. 	Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual	
Program Pembentukan Hukum	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan. 	Kepala Bidang Hukum	

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Program Pemajuan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM. 2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM 2. Jumlah kabupaten/kota peduli HAM. 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM. 4. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah. 	Kepala Bidang HAM	
Program Pembinaan Hukum Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi. 2. Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin. 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hokum. 4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah. 5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk 	Kepala Bidang Hukum	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
		hukum daerah. 6. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum.		



Pekanbaru, 10 Januari 2022
 Kepala Kantor Wilayah,

Pujo Harinto
 NIP. 196703311990011001